

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa pada transaksi pembayarannya.¹ Secara umum, BPRS dan Bank Umum Syariah (BUS) memiliki peran serupa yakni menjadi perantara keuangan dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan ketentuan syari'ah.² Dengan adanya kesamaan fungsi namun dengan administrasi yang lebih mudah serta akses yang lebih dekat kepada masyarakat, diharapkan BPRS dapat berperan lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM.³

Kinerja keuangan pada BPRS menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola keuangan pada periode tertentu dan mencakup pengumpulan serta penyaluran dana.⁴ Kinerja keuangan BPRS akan memberikan informasi kepada pemerintah, investor, dan nasabah tentang kondisi keuangan yang

¹ Ade Chandra, "Analisa Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dengan Bank Perkreditan Rakyat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2021): 195.

² Abdul Aziiz Ahmad Fauzi, Dedah Jubaedah, and Yulia Fithruany Rahmah, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat," *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2024): 35.

³ Della Hantika, "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Gunung Krakatau)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2023): 91.

⁴ Junior T. A. Lalonsang and Herman Karamoy, "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Metode Multi Attribute Decision Making (MADM)," *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat* 2, no. 2 (2024): 191.

dapat mencerminkan kinerja BPRS.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK terlihat bahwa BPRS mengalami perkembangan pada setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank. Berikut merupakan perkembangan jumlah BPRS di Indonesia periode 2019-2024:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah BPRS Periode 2019 – 2024

Periode	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BPRS	164	163	164	167	173	174

Sumber : <https://ibpr-s.ojk.go.id>

Dari tabel tersebut disimpulkan bahwasanya jumlah BPRS di Indonesia dari tahun 2019–2024 menunjukkan perkembangan yang stabil dengan adanya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah BPRS tercatat sebanyak 164, lalu mengalami sedikit penurunan menjadi 163 pada tahun 2020. Namun, jumlahnya kembali keangka 164 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan secara bertahap menjadi 167 pada tahun 2022, 173 pada tahun 2023, hingga mencapai 174 pada tahun 2024.

Selain dari peningkatan jumlah BPRS, perkembangan BPRS di Indonesia bisa diketahui melalui perkembangan total aset dan pembiayaan setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan BUS, aset yang dimiliki BPRS memang lebih kecil, oleh sebab itu pembiayaan lebih difokuskan untuk UMKM. Tujuan utama BPRS adalah membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, baik yang di desa maupun di kota, terutama

⁵ M. Yusuf Amar et al., “Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022,” *Jurnal Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 4 (2023): 3.

yang belum dijangkau oleh bank umum.⁶ Berikut merupakan gambaran tentang perkembangan aset dan pembiayaan BPRS di Indonesia.

Tabel 1.2
Perkembangan Aset dan Pembiayaan BPRS di Indonesia

**Miliar Rupiah*

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aset	13.934	14.944	17.060	20.157	23.177	25.032
DPK	8.732	9.819	11.592	13.446	15.270	16.844
Pembiayaan iB	9.943	10.681	11.984	14.448	17.025	18.986
Lancar	9.243	9.908	10.139	12.358	14.263	15.106
Kurang Lancar	141	125	128	129	226	283
Diragukan	124	126	102	121	208	265
Macet	434	522	603	604	670	922
NPF (Nominal)	700	773	833	855	1.104	1.471
NPF (%)	7,4	7,24	6,95	5,91	6,49	7,75

Sumber: www.ojk.go.id

Dari tabel diatas diketahui bahwa aset, pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS di Indonesia terus meningkat secara selama enam tahun terakhir. Kenaikan pembiayaan ini disebabkan oleh banyaknya terjadi kehilangan pekerjaan pada masyarakat serta menghadapi masalah ekonomi selama Covid-19. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban pembayaran cicilan ke bank.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan BPRS pasti tidak lepas dari risiko.⁸

⁶ Muhammad Ikhsan Harahap and Rahmat Daim Harahap, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS," *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 67-68.

⁷ Anisa Nur Fitriyanti and Mufti Arief Arfiansyah, "Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Dan Agunan Yang Diambil Alih Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Di Era Covid-19," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12, no. 2 (2023): 184.

⁸ Asti Marlina and Aulia Eka Sopiandi, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman Cabang Bogor," *MONETER: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 9, no. 1 (2021): 14.

BPRS menghadapi 2 profil resiko, yaitu resiko pembiayaan dan resiko likuiditas.⁹ Risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yaitu rasio yang dipakai untuk melihat risiko ketika BPRS tidak mampu mendapatkan kembali uang pokok serta keuntungan pembiayaan atau investasi yang telah diberikan. Apabila rasio NPF semakin tinggi, artinya risiko yang muncul dari pembiayaan bermasalah juga semakin besar.¹⁰ Bank Indonesia menetapkan batas maksimal NPF yaitu 5%.¹¹ Secara nasional, NPF BPRS di Indonesia berada diatas 5%. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rata-rata NPF BPRS di Indonesia mencapai 7,75% pada tahun 2024.

Dari sisi kinerja diketahui bahwa selama enam tahun terakhir, terjadi fluktuasi likuiditas BPRS di Indonesia. Likuiditas bisa dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yakni total pendanaan yang disalurkan guna mendukung investasi yang telah direncanakan, yang berasal dari dana pihak ketiga dalam jangka waktu.¹² Pada tahun 2019-2021 rasio FDR mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022-2024 kembali mengalami kenaikan, dengan rasio 112,7% pada tahun 2024.¹³

⁹ Nur Azlina, Husni Shabri, and Ibnu Qizam, "Determinan Profil Risiko Terhadap Performance Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Sumatera Barat," *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2023): 92.

¹⁰ Nisa Arinda, Iwan Setiawan, and Fifi Afyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 3 (2022): 481-482.

¹¹ Anisa Nur Fitriyanti and Mufti Arief Arfiansyah, *op.cit.*

¹² Abdul Karim and Fifi Hanafia, "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Di Indonesia," *TARGET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2020): 39.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," last modified 2024, accessed March 7, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024.aspx>.

Dari sisi profitabilitas, *Return On Assets* (ROA) BPRS di Indonesia dalam enam tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. ROA yaitu rasio untuk menilai sejauh mana manajemen pada bank dapat menghasilkan keuntungan secara keseluruhan.¹⁴ Rasio ROA menurun pada tahun 2019 hingga 2021, lalu mengalami peningkatan selama tahun 2022 dan 2023, kemudian turun lagi pada tahun 2024 sebesar 1,51%.¹⁵

Selain Pandemi, BPRS juga menghadapi beberapa tantangan yaitu keberadaan Bank Umum serta Bank Asing dengan kekuatan keuangan yang besar sehingga dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah besar pada sektor kredit mikro yang sebenarnya menjadi pasar utama BPRS.¹⁶ Selain itu, perkembangan *fintech peer to peer lending* (pinjaman online) yang sangat cepat, mudah penggunaannya serta berbagai promo yang ditawarkan, sehingga menarik minat masyarakat.¹⁷ Disamping itu, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah ke pelaku usaha kecil untuk menghadapi kesulitan akibat pandemi juga mengakhibatkan meningkatnya potensi kegagalan BPRS secara tidak langsung.¹⁸

¹⁴ Yuda Yudianto, Iwan Setiawan, and Moch. Edman Syarief, "Pengaruh Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2014-2023," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 192.

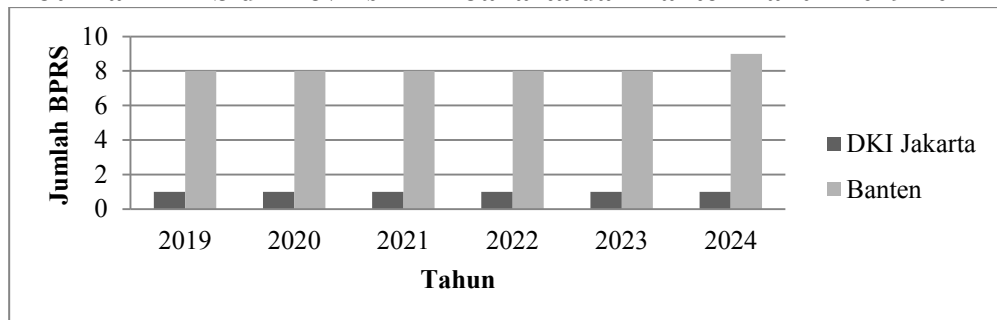
¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*

¹⁶ Mohammad Sofyan, "Analysis Financial Performance Of Rural Banks In Indonesia," *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)* 3, no. 3 (2019): 255.

¹⁷ Mohammad Sofyan, "Kinerja BPR Dan BPRS Pada Masa Pandemi Covid-19," *ResearchGate* 2, no. 2 (2021): 7.

¹⁸ *Ibid.*

Gambar 1.1
Jumlah BPRS di Provinsi DKI Jakarta dan Banten Tahun 2019-2024



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019-2024

Dari gambar diatas dapat diketahui perkembangan jumlah BPRS di Provinsi DKI Jakarta dan Banten dalam rentang waktu 2019-2024. Jumlah BPRS di DKI Jakarta tetap stabil sejak tahun 2019-2024 yakni 1 BPRS.¹⁹ Namun pernah ada 1 BPRS yang bangkrut di DKI Jakarta yaitu BPRS Hidayah yang dicabut izin usahanya oleh OJK pada bulan Juni 2015.²⁰ Penyebab utamanya adalah karena pengelolaan yang kurang baik sehingga mengakibatkan munculnya tindakan kecurangan dalam manajemen.²¹

Sementara itu, jumlah BPRS di Banten cenderung stabil antara tahun 2019-2023 dengan jumlah 8 BPRS, dan pada tahun 2024 jumlahnya bertambah menjadi 9 BPRS.²² Penambahan ini terjadi karena terdapat 1 BPR yang dialihkan menjadi BPRS pada bulan Januari 2024 yakni BPRS Risky Barokah.²³ Selain dari bertambahnya jumlah BPRS, perkembangan BPRS di

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*

²⁰ Gatti, "LPS Ambil Alih BPRS Hidayah Jakarta," *Beritamometer*, last modified 2015, accessed June 29, 2025, <https://beritamometer.com/lps-ambil-alih-bprs-hidayah-jakarta/>.

²¹ Yunita Amalia, "OJK Ungkap Alasan Pencabutan Izin BPR Dan BPRS Mulai Tata Kelola Buruk Dan Fraud," *Merdeka.Com*, last modified 2025, accessed June 30, 2025, <https://www.merdeka.com/uang/ojk-ungkap-alasan-pencabutan-izin-bpr-dan-bprs-mulai-tata-kelola-buruk-dan-fraud-274272-mvk.html>.

²² Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*

²³ Ashar Saiful Rizal, "Peluncuran BPR Syariah Rizky Barokah," *SinPo.Id*, last modified 2024, accessed June 29, 2025, <https://sinpo.id/detail/69211/peluncuran-bpr-syariah-rizky-barokah>.

DKI Jakarta dan Banten juga dapat dilihat dari perkembangan total aset dan laba bersih setiap tahunnya.²⁴ Berikut perkembangan aset dan laba bersih BPRS di DKI Jakarta dan Banten tahun 2022-2024:

Tabel 1.3
Perkembangan Aset dan Laba Bersih BPRS DKI Jakarta dan Banten
Tahun 2022-2024

**Ribuan Rupiah*

No	Nama BPRS	Tahun	Aset	Laba Bersih
1	PT BPRS Hijra Alami	2022	130,337,995	1,297,021
		2023	304,029,939	3,332,965
		2024	220,882,888	(20,759,394)
2	PT BPRS Attaqwa	2022	70,467,162	641,348
		2023	85,514,171	200,871
		2024	76,317,012	(5,654,160)
3	PT BPRS Wakalumi	2022	23,289,065	(102,459)
		2023	26,120,660	(10,840)
		2024	44,346,862	287,476
4	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	2022	187,006,210	560,658
		2023	212,868,346	2,069,902
		2024	302,795,911	1,338,415
5	PT BPRS Berkah Ramadhan	2022	73,244,731	(1,303,075)
		2023	73,595,760	(1,620,951)
		2024	90,317,694	1,283,306
6	PT BPRS Muamalah Cilegon	2022	67,587,415	1,686,568
		2023	81,132,524	2,035,539
		2024	90,221,941	2,483,406
7	PT BPRS Cilegon Mandiri	2022	148,744,693	3,381,979
		2023	150,497,201	(4,693,671)
		2024	143,434,099	(1,894,163)
8	PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	2022	29,641,944	(1,795,306)
		2023	59,195,858	(647,847)
		2024	47,652,789	(3,440,679)
9	PT BPRS Harta Insan Karimah	2022	643,334,692	5,518,881
		2023	711,966,108	7,681,479
		2024	745,075,513	8,435,557

²⁴ Muhammad Ikhsan Harahap and Rahmat Daim Harahap, *op.cit*, 68.

10	PT BPRS Risky Barokah	2022	-	-
		2023	-	-
		2024	76,764,706	1,108,845

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwasanya BPRS Hijra Alami menunjukkan perubahan pada aset dan laba bersih setiap tahunnya. Sementara itu, BPRS Attaqwa menunjukkan fluktuasi aset dan penurunan laba bersih selama periode yang sama. BPRS Wakalumi menunjukkan adanya kenaikan aset dan laba bersih disetiap tahunnya. BPRS Mulia Berkah Abadi mengalami peningkatan pada aset yang dimiliki meskipun laba bersihnya tidak stabil. BPRS Berkah Ramadhan menunjukkan peningkatan pada aset, sedangkan laba bersihnya menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya..

BPRS Muamalah Cilegon tahun 2022-2024 terdapat kenaikan pada aset dan laba bersih. BPRS Cilegon Mandiri mengalami fluktuasi pada aset dan laba bersih di setiap tahunnya. Sementara itu, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia menunjukkan perubahan yang tidak stabil pada aset dan laba bersih setiap tahunnya. BPRS Harta Insan Karimah mengalami kenaikan pada aset dan laba bersih disetiap tahunnya. Sedangkan pada BPRS Risky Barokah tidak mengalami fluktuasi karena baru terdaftar di OJK pada tahun 2024. Selain dari perkembangan aset dan laba bersih, kinerja keuangan BPRS juga dapat dilihat melalui analisis rasio keuangannya.²⁵ Berikut merupakan rasio keuangan BPRS di DKI Jakarta dan Banten.

²⁵ Reza Muhammad Rizqi and Diah Intan Syahfitri, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi PT Bank Samawa Kencana)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (2020): 23.

Tabel 1.4
Rasio Keuangan BPRS di DKI Jakarta dan Banten tahun 2022-2024 (%)

No	Nama BPRS	Tahun	ROA	NPF	FDR	BOPO
1	PT BPRS Hijra Alami	2022	1,29	2,09	55,12	85,52
		2023	1,39	1,96	71,1	79,73
		2024	(8,41)	0,69	58,59	202,98
2	PT BPRS Attaqwa	2022	1,09	3,62	75,42	59,2
		2023	0,27	5,07	27,19	58,14
		2024	(10,02)	18,59	163,69	154,86
3	PT BPRS Wakalumi	2022	(0,46)	9,33	66,02	107,4
		2023	(0,04)	9,48	84,1	78,19
		2024	0,82	8,05	83,47	94,4
4	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	2022	0,31	2,79	66,21	94,73
		2023	1,07	3,17	65,35	86,44
		2024	0,52	1,74	62,64	93,08
5	PT BPRS Berkah Ramadhan	2022	(1,78)	13,67	84,31	123,04
		2023	(2,3)	12,6	80,85	134,32
		2024	1,57	8,02	80,99	93,59
6	PT BPRS Muamalah Cilegon	2022	3,27	1,45	56,83	70,85
		2023	3,45	4,55	63,14	71,78
		2024	4,53	3,72	55,9	69,08
7	PT BPRS Cilegon Mandiri	2022	2,83	10,72	73,19	414,48
		2023	(3,11)	9,68	108,96	137,09
		2024	(1,27)	9,65	138,22	108,76
8	PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	2022	(6,06)	7,81	81,27	194,06
		2023	(1,09)	4,6	95,45	93,8
		2024	(1,56)	5,26	111,68	158,4
9	PT BPRS Harta Insan Karimah	2022	1,15	6,15	82,46	88,42
		2023	1,57	4,51	85,25	88,57
		2024	1,58	4,69	88,05	87,91
10	PT BPRS Risky Barokah	2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
		2024	1,65	9,14	76,59	91,13
Rata-rata			(0,276)	6,529	80,073	114,998

Sumber: www.ojk.go.id

Dari rasio tersebut diketahui bahwasanya terdapat kinerja keuangan yang bervariasi secara signifikan pada setiap BPRS. Nilai *Return On Assets*

(ROA) BPRS di DKI Jakarta dan Banten dari sisi profitabilitas, rata-ratanya adalah -0,276%. Nilai rata-rata ROA BPRS di DKI Jakarta dan Banten termasuk kriteria “Tidak Sehat”. Merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan kriteria tidak sehat ($ROA < 0,5\%$).²⁶ Nilai ROA BPRS DKI Jakarta dan Banten periode 2022-2024 memperoleh kategori “Tidak Sehat” dan beberapa BPRS dengan kategori “Cukup Sehat”. Hal ini karena terdapat beberapa BPRS yang mempunyai nilai ROA negatif yang menunjukkan BPRS mengalami penurunan laba.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS DKI Jakarta dan Banten pada periode 2022-2024 dari sisi pembiayaan mempunyai nilai rata-rata 6,529%. Nilai rata-rata NPF BPRS di DKI Jakarta dan Banten secara keseluruhan termasuk kriteria “Sangat Sehat”. Merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2019 yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan kriteria $NPF \leq 7\%$ (sangat sehat) dan $NPF > 16\%$ (tidak sehat).²⁷ Nilai NPF BPRS DKI Jakarta dan Banten periode 2022-2024 termasuk kategori “Sangat Sehat” dan beberapa BPRS termasuk dalam kategori “Tidak Sehat”.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di BPRS DKI Jakarta dan Banten pada periode 2022-2024 dari sisi likuiditas mempunyai nilai rata-rata

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*.

80,073%. Nilai rata-rata FDR BPRS di DKI Jakarta dan Banten secara keseluruhan termasuk kriteria “Sehat“. Merujuk pada Surat Edaran OJK Nomor 02/SEOJK.03/2016 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR serta BPRS dengan kriteria sangat sehat ($6FDR \leq 75\%$), sehat ($75\% \leq FDR \leq 85\%$), cukup sehat ($85\% \leq FDR \leq 100\%$) dan tidak sehat ($FDR > 120\%$).²⁸ Nilai FDR BPRS DKI Jakarta dan Banten periode 2022-2024 termasuk kategori “Cukup Sehat” sedangkan beberapa BPRS lain termasuk kategori “Tidak Sehat”.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BPRS DKI Jakarta dan Banten pada periode 2022-2024 dari sisi operasional mempunyai nilai rata-rata 114,998%. Nilai rata-rata BOPO BPRS di DKI Jakarta dan Banten secara keseluruhan termasuk kriteria “Tidak Sehat“. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan kriteria sehat ($85\% < BOPO \leq 90\%$) dan tidak sehat ($BOPO > 100\%$).²⁹ Hal ini karena terdapat 6 BPRS yang nilai BOPO diatas 100%, menandakan bahwa BPRS tersebut tidak mampu mengatur pengeluaran operasional sehingga laba yang diperoleh menurun.

BPRS mungkin menghadapi kesulitan keuangan dalam situasi tertentu. Apabila tidak ditangani dengan tepat, masalah ini bisa meningkat

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Otoritas Jasa Keuangan*.

²⁹ Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

menjadi lebih serius hingga berujung bangkrut.³⁰ Kebangkrutan merupakan keadaan dimana BPRS menghadapi kegagalan finansial karena ketidakmampuan BPRS dalam melunasi kewajibannya dengan tepat waktu, yang mengakibatkan masalah likuiditas yang mungkin menjadi awal dari kebangkrutan.³¹ Untuk mencegah hal ini, diperlukan analisis kebangkrutan sebagai bentuk peringatan dini. Semakin cepat tanda-tanda kebangkrutan dideteksi, semakin besar peluang untuk mencegahnya. Pihak manajer dapat menggunakan prediksi analisis keuangan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kebangkrutan.³²

Analisis risiko kebangkrutan pada BPRS penting untuk dilakukan. Banyak penelitian yang telah menghasilkan bermacam metode prediksi yang berguna untuk membantu BPRS dalam memperbaiki kondisi keuangannya sebelum terlambat. Beberapa metode yang cukup populer yaitu model Z-Score oleh Altman, model S-Score oleh Springate, model X-Score oleh Zmijewski, serta model G-Score oleh Grover.³³ Selain itu juga ada model Sherrod Z-Score oleh Beaver.³⁴

³⁰ Purnama Dewi Buchari, Sri Murni, and Victoria N . Untu, "Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score , Sringate Dan Zmijewski (Studi Kasus Pada Bank Silicon Valley Yang Mengalami Kebangkrutan)," *Jurnal EMBA* 11, no. 3 (2023): 114.

³¹ Rahmat Kurnia and Ahmad Wira, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah Teori Dan Praktik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024), 236.

³² Gilang Saputra, Tri Widodo, and Maria Entina Puspita, "Analisis Metode Springate, Zmijewski, Altman Z-Score Dalam Memprediksi Kebangkrutan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 11119.

³³ Nabiilatur Rosyidah Azzahro and Seomaryono, "Analisis Perbandingan Prediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Liability* 2, no. 2 (2020): 54.

³⁴ Guleshan Mohsin Hamid et al., "Using Altman and Sherrod Z-Score Models To Detect Financial Failure For The Banks Listed On The Iraqi Stock Exchange (ISE) Between 2009-2013," *International Journal Of Professional Business Review* 8, no. 4 (2023): 4.

Pada penelitian ini terdapat 3 metode yang dipakai dalam menganalisis kebangkrutan. Metode analisisnya yaitu Altman Z-Score, Zmijewski serta Grover. Pemilihan ketiga metode ini didasarkan pada kemampuan ketiganya dalam memprediksi risiko kebangkrutan secara efektif. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena rasio perhitungan yang digunakan dalam setiap metode dapat ditemukan dalam Laporan Keuangan perusahaan, selain itu juga cocok digunakan untuk memprediksi kebangkrutan di sektor perbankan baik konvensional maupun syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai analisis kebangkrutan dilakukan oleh Rahmat Kurnia, Lucky Nugroho, dan Anees Janee-Ali. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan hasil prediksi kebangkrutan pada perbankan syariah di Indonesia dengan periode penelitian 2018-2022. Hasilnya mengindikasikan bahwasanya ketiga metode yakni Altman, Zmijewski serta Grover memiliki perbedaan dalam memprediksi kebangkrutan.³⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Elya Yuliani, Usdeldi, dan Mohammad Orinaldi. pada penelitian ini menganalisis prediksi kebangkrutan PT Martina Berto Tbk yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut metode Altman Z-score, Springate serta Grover PT Martina berto Tbk berpotensi mengalami

³⁵ Rahmat Kurnia, Lucky Nugroho, and Anees Janee-Ali, "Signaling Theory Vis A Vis Bankruptcy Prediction Model in Islamic Bank Industry in Indonesia," *Aibi research, management and engineering journal* 12, no. 1 (2024): 195.

kebangkrutan. Namun pada metode Zmiejewski, PT Martina berto Tbk tidak berpotensi mengalami kebangkrutan.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penghitungan, analisis dan perbandingan hasil analisis kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score, Zmiejewski dan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK periode 2022-2024. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, berasal dari data laporan keuangan BPRS yang diperoleh dari website OJK. Sampel yang digunakan yaitu 10 BPRS yang terdapat pada Provinsi DKI Jakarta dan Banten periode 2022-2024. Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu uji beda untuk menganalisis perbedaan metode kebangkrutan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penggunaan metode Altman Z-Score, Zmiejewski dan Grover dapat memprediksi tingkat kebangkrutan secara keseluruhan di BPRS DKI Jakarta dan Banten.

Dari penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kebangkrutan dengan Metode Altman, Zmiejewski dan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang Terdaftar di OJK Periode 2022-2024”**

³⁶ Elya Yuliani, Usdeldi, and Mohammad Orinaldi, “Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Metode Altman Z-Score, Zmiejewski, Springate Dan Grover Pada PT Martina Berto Tbk,” *J-ISACC : Journal Islamic Accounting Competency* 5, no. 2 (2024): 77–90.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Apakah terdapat potensi kebangkrutan pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?
2. Apakah terdapat perbedaan hasil analisis kebangkrutan menggunakan Metode Altman dengan Zmijewski, Altman dengan Grover, serta Zmijewski dengan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?
3. Apakah terdapat perbedaan hasil analisis kebangkrutan menggunakan Metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui potensi kebangkrutan pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024.
2. Untuk mengetahui perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan menggunakan Metode Altman dengan Zmijewski, Altman dengan Grover, serta Zmijewski dengan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024.
3. Untuk mengetahui perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan menggunakan Metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cakupan yang luas, sehingga peneliti membatasi fokusnya hanya pada Analisis Kebangkrutan dengan Metode Altman, Zmijewski, dan Grover pada BPRS di DKI Jakarta dan Banten yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024. Peneliti menggunakan periode 2022-2024 karena periode tersebut memiliki data yang terbaru dan relevan untuk menggambarkan kondisi BPRS saat ini. Peneliti juga melihat apakah BPRS berhasil bertahan atau justru mengalami peningkatan resiko kebangkrutan pasca pandemi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi teori tentang analisis kebangkrutan dengan metode Altman, Zmijewski dan Grover, serta dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, informasi serta rujukan dalam dunia akademik dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Nasabah BPRS DKI Jakarta dan Banten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk nasabah maupun calon nasabah BPRS DKI Jakarta dan Banten dalam memperhatikan kesehatan keuangan BPRS sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

b. BPRS DKI Jakarta dan Banten

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi para praktisi dalam menganalisis kebangkrutan untuk menilai kondisi

finansial BPRS yang berpeluang terjadi bangkrut sehingga mampu mengambil keputusan yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk BPRS DKI Jakarta dan Banten kedepannya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini tersusun dengan rapi dan sistematis, penulis menyusun bab-bab berdasarkan urutan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan serta analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan serta pembahasan yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak berdasarkan data tersebut.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.